

ANALISIS FRAUD PENTAGON THEORY DALAM PROSES PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN SEKARAN)

Dwi Lestari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Lestari260493@gmail.com

Nur Fadrih Asyik
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
nurfadrih_elearning@stiesia.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
4 Juni 2023

Tanggal Revisi:
16 Juni 2023

Tanggal Diterima:
6 Juli 2023

Publikasi On line:
20 Juli 2023

Abstract

This study aims to determine the effect of pressure, arrogance, competence, opportunity, and rationalization on the tendency of fraud in the process of government procurement of goods and services. The population of this study were all village officials in Sekaran District, Lamongan Regency. Using the purposive sampling technique, the sample in this study is the primary sample, namely village officials in Sekaran District who have more than 2 years experience in the process of procuring government goods and services with a total of 174 respondents. The data analysis technique used is the Structural Equation Model (SEM) with the Smart application. PLS V4 namely validity test, reliability and hypothesis testing. The results of data processing found that each pressure, arrogance, competence, opportunity, and rationalization had no effect on fraud in the process of procuring government goods and services.

Key Words: Pentagon Fraud Theory, Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Fraud

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan (pressure), arogansi (arrogance), kompetensi (competence), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Dengan Teknik pengambilan sampel purposive sampling sampel dalam penelitian ini adalah sampel primer yaitu perangkat desa di Kecamatan Sekaran yang berpengalaman diatas 2 tahun dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dengan berjumlah 174 responden, Teknik analisa data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) dengan aplikasi Smart PLS V4 yaitu uji validitas, reabilitasa dan uji hipotesis. Hasil olah data menemukan bahwa masing masing tekanan (pressure), arogansi (arrogance), kemampuan (competence), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) tidak berpengaruh terhadap fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Key Words: Pentagon Fraud Theory, Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Fraud

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah merupakan aktivitas pengadaan baik berupa barang maupun jasa dalam rangka membangun sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada semester I tahun 2021 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi modus tindakan korupsi yang sangat banyak digunakan oleh pejabat pemerintahan. Tercatat bahwa korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa berupa proyek fiktir sebanyak 53 kasus dengan kerugian negara mencapai sebesar Rp. 270,6 Milyar. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi urutan kedua korupsi paling banyak dengan jumlah sebanyak 114 kasus dalam 5 tahun terakhir, 90% kasus berhasil ditangani KPK, Kejaksaan atau kepolisian setempat (Mulyandini et al., 2023). Menurut (Wardhani et al., 2021) terdapat 10 faktor yang menjadikan pengadaan barang jasa pemerintah rawan terjadi kecurangan yaitu (1) adanya persekongkolan para peserta tender, (2) adanya suap untuk memenangkan

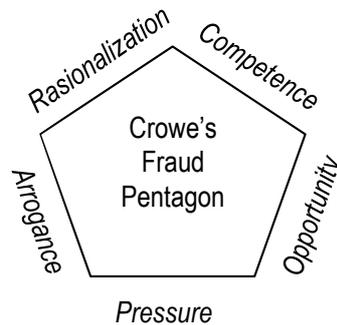
tendr (3) kurang terbukanya proses pelaksanaan tender (4) para peserta tender atau supplier memasang harga tertinggi (5) adanya unsur nepotisme dalam pemenangan tender (6) pelaku tender mencantumkan spesifikasi tertentu untuk kepentingan satu pemasok, (7) unsur almamater sentris, (8) pemenangan tender bahkan tidak memiliki kelengkapan administrasi, (9) beberapa kejadian tender tidak diumumkan, (10) proses tender tidak dapat diakses bagi peserta dalam suatu daerah. Sedangkan menurut (Larasati et al., 2017) kelemahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional adalah transparansi, inefisiensi dan ketidaksesuaian fungsi pengadaan. Penyebab terjadinya kecurangan atau fraud dapat digolongkan menjadi yaitu sumber eksternal (organisasi) dan sumber internal (individu) (Dewi & Dewi, 2021). Baru baru ini di kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan pelaku korupsi proses hibah PJJU dengan nilai sebesar 47 Miliar dari total hibah sebesar 64 Miliar yang dilakukan oleh penyedia, serta pelaku pengadaan hibah (Detikjatim, 2023a). Kasus korupsi terhadap pengadaan barang jasa lainnya yaitu pada bulan januari diketahui seorang Kepala Desa terseret kasus korupsi pengurusan tanah pada Gedung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Lamongan dimana kejadian ini merupakan kasus tahun 2017 dan terus berkembang hingga saat ini, akibat tindakan ini negara dirugikan sebesar 564 juta rupiah (Detikjatim, 2023b). selanjutnya terdapat dugaan korupsi atas bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dugaan ini masih dalam penyelidikan oleh aparat berwenang (Bojonegoro Radar, n.d.). Kecurangan atau Fraud dapat terjadi di semua jenis organisasi, baik organisasi swasta ataupun organisasi pemerintah. Oleh karena pemerintah harus beroperasi secara efektif, efisien dan ekonomis untuk dapat mendeteksi kecurangan sedini mungkin. Salah satunya dengan melakukan pendekatan analitis dengan menggunakan fraud pentagons theory (Darwati, 2019). Crowe (2011) memperkenalkan Fraud Pentagons Theory yakni lima faktor pemicu yang mendasari individu melakukan fraud atau kecurangan yaitu arogansi (*arrogance*), tekanan (*pressure*), kemampuan (*competence*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalization*). Dalam theory pentagons, Crowe menambahkan satu faktor pemicu dari diamonds theory yaitu *arrogance*/arrogansi merupakan sikap superioritas atau sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku terhadap dirinya (Artantri et al., 2016), *arrogance* dan *competence* dikatakan bahwa keduanya saling mendukung, dimana apabila seorang individu memiliki arogansi yang tinggi tanpa didukung oleh adanya kemampuan, maka fraud tidak mungkin terjadi, sedangkan meskipun seorang individu memiliki kompetensi yang tinggi akan tetapi tidak ada arogansi dalam dirinya maka kemungkinan individu tersebut melakukan kecurangan akan sangat kecil (Fahjar, 2019). Penelitian ini menggunakan teori terbaru fraud yaitu teori Crowe Fraud Pentagons Theory, yang memiliki lima indikator atau dianggap paling lengkap dan kompleks disbanding Fraud Diamond Theory ataupun Fraud Triangle Theory. Selain itu penelitian ini berfokus pada kecurangan/ fraud pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah desa. Dalam penelitian (Darwati, 2019) menggunakan variabel pentagon fraud dengan fokus penelitian pada perilaku fraud oleh mahasiswa dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan serta arogansi berpengaruh terhadap perilaku kecuranga. Kemudian penelirian oleh (E. Suryandari & Pratama, 2021) menggunakan variabel sifat sebagai variabel keenam dan pada penelitiannya menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku *fraud*. (Larasati et al., 2017) menggunakan pengendalian internal, Whistleblowing system dan good Governance sebagai variabel ke satu dua dan tiga yang merupakan proksi dari variabel kesempatan pada Pentagon fraud theory, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan kesempatan dengan diproksikan oleh pengendalian internal, Whistleblowing system dan good Governance mampu mencegah perilaku fraud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami tentang pentagon fraud yaitu pengaruh tekanan, arogansi, kemampuan, peluang dan rasionalitas terhadap kecenderungan kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang Fraud Phentagon theory, serta dapat menambah kewaspadaan pada pemerintahan terkait kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, agar mampu membuat kebijakan yang tepat sasaran

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Pentagons Fraud Theory

Teori ini dikenalkan oleh Crowe Howart pada tahun 2011 yang mana terdapat satu indikator pemicu tambahan seorang individu melakukan kecurangan atau *fraud* yang mana sebelumnya *fraud diamond theory* oleh Wolfe dan Hermanson pada 2004 menyebutkan faktor yang mendorong individu melakukan kecurangan atau *fraud* adalah tekanan (*pressure*), kemampuan (*competence*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalization*).

Maka Crowe menambahkan satu indikator yaitu *Arrogance* (arogansi/kesombongan) sehingga terdapat lima indikator pemicu terjadinya *fraud*:



Gambar 1.
Indikator Fraud Pentagon Theory
Sumber : (Ratnasari & Solikhah, 2019)

Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan suatu dorongan atau motivasi yang ingin dicapai akan tetapi terhalang oleh keadaan atau tidak adanya kemampuan untuk mendapatkannya, umumnya tekanan adalah berupa tekanan keuangan atau finansial, tekanan atas pekerjaan dan tekanan oleh atasan (Darwati, 2019). Menurut Mulyandini et al., (2023) tekanan adalah sebuah keadaan dimana seseorang tidak memiliki finansial yang kuat akan tetapi dihadapkan pada kebutuhan hidup yang cukup tinggi, maka dalam kondisi tersebut seorang individu akan ditekan untuk melakukan kecurangan atau *fraud*. Terdapat dua jenis tekanan yaitu tekanan internal dan tekanan eksternal, tekanan internal adalah tekanan yang berasal dari dalam diri individu seperti pemenuhan atas kebutuhan hidup dan gaya hidup, sedangkan tekanan eksternal adalah tekanan yang didapatkan dari luar seperti tekanan oleh lingkungan kerja atau tekanan dari atasan langsung, semakin tinggi tekanan yang dialami oleh seorang individu maka akan memacu lebih besar kecenderungan dalam melakukan kecurangan (Agustina & Pratomo, 2019). Dalam penelitian (N. P. E. Suryandari et al., 2019) menyatakan secara spesifik bahwa tidak adanya keterkaitan antara perilaku kecurangan dengan tekanan eksternal. Deskripsi tersebut mengarah pada Hipotesis yaitu:

H1: Tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Kesempatan/ Peluang (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan peluang yang dapat memicu terjadinya kecurangan atau fraud, dimana seorang individu pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan kecurangan akan tetapi dikarenakan pengawasan dan pengendalian system yang lemah, maka timbul Hasrat melakukan tindakan kecurangan (Mulyandini et al., 2023). Hal yang memicu timbulnya Hasrat melakukan *fraud* adalah keyakinan bahwa tindakan kecurangan mereka tidak akan diketahui oleh system yang ada, salah satu indikator *opportunity fraud* adalah lemahnya system pengendalian, yang mana pengawasan yang dilakukan oleh internal organisasi tidak berjalan efektif dan efisien (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019), maka untuk menekan tindakan kecurangan, sebuah organisasi perlu untuk menjalankan pengawasan internal yang efektif dan efisien diantaranya adalah peningkatan kinerja auditor internal (Yusrianti et al., 2020). Jumlah anggota tim pengawas atau audit internal juga dapat menjadi pemicu timbulnya fraud, sedikitnya pengawas atau auditor internal dalam pelaksanaan pengawasan organisasi yang kompleks menimbulkan ketidakefektifan kinerja yang dapat membuka peluang tindak kecurangan (Agustina & Pratomo, 2019).

H2: Kesempatan berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi merupakan kualitas sumber daya manusia yang baik yang didukung oleh kesesuaian latar belakang Pendidikan, pengalaman memangku sebuah jabatan, pembaharuan pengetahuan melalui pelatihan, mengerti dan memahami prosedur kerja (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019).

Hidayati & Mulyadi (2017) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kualitas sumber daya manusia dalam aktivitas pengadaan termasuk pokja ULP dan atau pejabat pengadaan berimplikasi positif untuk menekan

terjadinya kecurangan atau *fraud* dimana semakin baik pemahaman pejabat pengadaan dan semakin tingginya kemampuan mereka dalam mengelola proses pengadaan barang jasa pemerintah, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kecurangan, dikarenakan semakin tinggi kehati-hatian mereka (Wijayanti & Hanafi, 2018). Lebih banyaknya sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan baik didalam maupun diluar negeri juga mampu untuk menekan timbulnya kecenderungan tindakan kecurangan (Ratnasari & Solikhah, 2019). Oleh sebab itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara berkala terhadap setiap individu dalam sebuah organisasi, untuk memastikan kualitas sumber daya manusia organisasi tersebut tetap baik.

H3: Kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Rasionalisasi (Rasionalization)

Rasionalisasi merupakan pembenaran yang dilakukan oleh individu atas tindakan kecurangan yang dilakukannya Suryandari et al., (2019) mengatakan bahwa indikator rasionalisasi merupakan indikator yang cukup sulit diukur. Rasionalisasi merupakan sebuah sikap atau tindakan untuk memberikan pembenaran tindakan kecurangan yang hendak dilakukan oleh individu, sehingga sikap rasionalitas ini dilakukan sebelum bukan sesudah (Achmad, 2019). Rasionalisasi yang sering dilakukan oleh pelaku kecurangan yaitu anggapan karena kecurangan yang dilakukan dianggap wajar dan dilakukan banyak organisasi, anggapan bahwa individu layak karena organisasi berhutang jasa, pelaku kecurangan beranggapan tidak ada yang dirugikan atas tindakan kecurangannya (Darwati, 2019)

Dalam penelitian oleh Agustina & Pratomo (2019) mengatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan kecurangan, hal ini bertentangan dengan penelitian oleh (Fahjar, 2019) yang menyatakan bahwa rasionalitas yang diproyeksikan dengan sikap, norma serta kontrol perilaku mampu menggambarkan fraud, yangmana menunjukkan bahwa rasionalitas menjadi hal yang mendukung perilaku kecurangan.

H4: Rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Arogansi (arrogance)

Arogansi merupakan keserakahan individu dimana ia merasa memiliki kemampuan dan kekuasaan, dan merasa berhak untuk bersikap serakah, dimana pemahaman ini membuat seorang individu pengawasan dan pengendalian organisasi tidak sampai kepada dirinya (Danuta, 2017). Lebih lanjut Rahman & Nurbatiti (2019) menyatakan bahwa terpampangnya foto pimpinan organisasi adalah salah satu wujud arogansi, yang mana hal itu ditujukan bahwa pimpinan ingin menunjukkan jabatan dan kekuasaanya pada publik.

Sebuah sistem penyelenggaraan secara elektronik, khususnya pada sistem pengadaan mampu menekan kecenderungan arogansi yang mampu untuk memicu timbulnya tindakan kecurangan (Danuta, 2017) selain itu proses penyelenggaraan akuntansi secara menyeluruh termasuk auditing dalam setiap proses tahapan pengadaan juga diperlukan untuk meminimalisir tingkat arogansi pimpinan mengintervensi sehingga menimbulkan tindakan kecurangan (Wiharti & Novita, 2020). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian tersebut Agustina & Pratomo (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa arogansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku kecurangan.

H5: Arogansi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini merupakan sumber data primer dan diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria yaitu: 1) pernah atau sedang menjadi tim pengadaan sarana prasarana. 2) bekerja dalam lingkup Kecamatan Sekaran. 3) menduduki jabatan sekurang-kurangnya 2 tahun. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Desa di seluruh kecamatan Sekaran yang terlibat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, dengan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 174 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, pengolahan data dilakukan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan aplikasi Smart PLS. metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis linear berganda. indikator setiap variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator
Tekanan (X1)	(Mulyandini et al., 2023)	Kompensasi Finansial Promosi Penyelenggaraan tugas atasan Apresiasi atasan
Kesempatan (X2)	(Fahjar, 2019)	Keterlibatan pengawasan masyarakat Evaluasi kinerja Pemantauan berkelanjutan Tindak lanjut
Kompetensi (X3)	(Fahjar, 2019)	Pelatihan berkelanjutan Pemahaman seluruh aparat Pembiaran Manipulasi
Rasionalisasi (X4)	(Fahjar, 2019)	Sikap Norma Kontrol perilaku
Arogansi (X5)	(Mulyandini et al., 2023)	Hubungan pimpinan dan bawahan Struktur organisasi Etika pimpinan Posisi kekuasaan
Pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (Y)	(Mulyandini et al., 2023)	Value for Money pengadaan barang dan jasa Prinsip pengadaan barang dan jasa Etika pengadaan barang dan jasa

HASIL PENELITIAN

Perancangan Outer Model

Dalam perancangan outer model merupakan model pengukuran luar untuk menguji loading faktor, menguji validitas antar variabel dengan ditunjukkan pada hasil uji *Average Variance Extracted (AVE)* dan *Fornel-Larcker* serta uji reabilitas yang ditunjukkan dengan uji *Composite Reliability* (Fahjar, 2019)

Tabel 2
Outer Loadings (Measurement model)

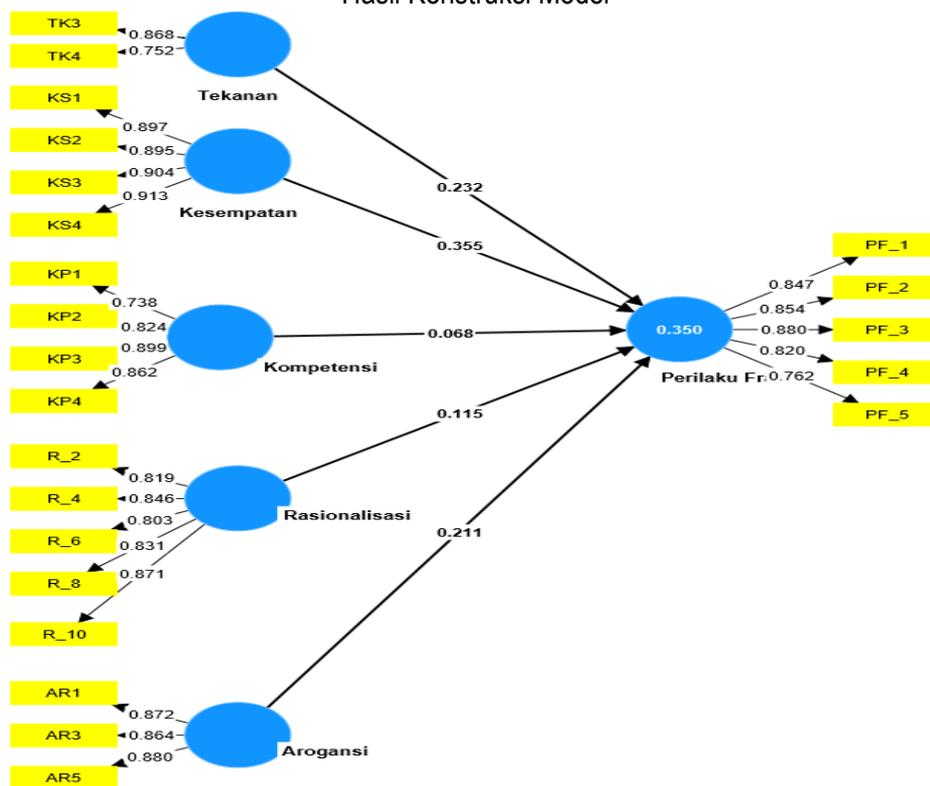
	Arogansi	Kesempatan	Kompetensi	Perilaku Fraud	Rasionalisasi	Tekanan
AR1	0.872					
AR3	0.864					
AR5	0.88					
KP1			0.738			
KP2			0.824			
KP3			0.899			
KP4			0.862			
KS1		0.897				
KS2		0.895				
KS3		0.904				
KS4		0.913				
PF_1				0.847		
PF_2				0.854		
PF_3				0.88		
PF_4				0.82		
PF_5				0.762		

R_10	0.871	
R_2	0.819	
R_4	0.846	
R_6	0.803	
R_8	0.831	
TK1		0.883
TK2		0.852
TK3		0.868
TK4		0.752

Sumber: *output* SmartPLS v4

Uji validitas konvergen bisa dilihat dari nilai *outer loading* pada tiap-tiap konstruk, sesuai hasil penelitian Chin pada 1995, data dikatakan valid apabila nilai *outer loading* diatas 0,7. Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai masing-masing konstruk diatas 0,7 yang berarti data diatas dikatakan Valid, sebelumnya terdapat beberapa konstruk yang memiliki nilai dibawah 0,7 dan untuk mendapatkan hasil yang valid, maka peneliti mengeluarkan konstruk dengan nilai dibawah 0,7. Validitas konvergen menunjukkan bahwa beberapa indikator mampu mewakili satu variabel laten dan mampi mendasari variabel laten tersebut.

Gambar 2
Hasil Konstruksi Model



Sumber: *Output* SmartPLS V4

Tabel Nilai Average Variance Extracted

Tabel 3
Average Variance Extracted (AVE)

	Rata-rata Variansi Diekstrak
Arogansi	0.760
Kesempatan	0.814
Kompetensi	0.694
Perilaku Fraud	0.695
Rasionalisasi	0.696
Tekanan	0.706

Sumber: *Output SmartPLS V4*

Selain nilai *outer loading* pengujian *convergen validity* selanjutnya dilakukan pengujian *Average Variance Extracted AVE*. pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah satu variabel laten mampu mendeskripsikan satu setengah indikatornya secara rata-rata. Dari tabel 3 di atas menunjukkan nilai AVE diatas 0,5 yang mana nilai AVE terkecil ada pada indikator kompetensi dan nilai AVE terbesar pada indikator kesempatan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *loading outer* dan nilai AVE dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat validitas konvergen.

Tabel Fornel larcker

Tabel 4
Fornel-Larcker

	Arogansi	Kesempatan	Kompetensi	Perilaku Fraud	Rasionalisasi	Tekanan
Arogansi	0.872					
Kesempatan	-0.039	0.902				
Kompetensi	0.171	0.357	0.833			
Perilaku Fraud	0.303	0.432	0.309	0.834		
Rasionalisasi	0.031	0.277	0.162	0.221	0.834	
Tekanan	0.392	0.122	0.253	0.371	-0.043	0.84

Sumber: *Output SmartPLS V4*

Pengujian *fornell-Larcker* dilakukan dengan maksud untuk melihat nilai *Diskriminant Validity* yaitu untuk melihat ketidaksesuaian antara variabel laten. Dari tabel 4 dapat dilihat yaitu nilai akar AVE masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai hubungan antara variabel, sehingga data dalam penelitian dikatakan valid.

Tabel Cronbachs Alpha dan Composite Reliability

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian *Composite Reliability*. Sebuah konstruk dikatakan reliabel apabila *composite reability* di atas 0.7 dan nilai *croncbach's alpha* yaitu diatas 0.6.

Tabel 5
Output Composite Reliability

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Arogansi	0.844	0.905
Kesempatan	0.924	0.946
Kompetensi	0.857	0.900
Perilaku Fraud	0.890	0.919
Rasionalisasi	0.894	0.919
Tekanan	0.860	0.906

Sumber: *Output SmartPLS V4*

Dari tabel 5 diatas semua indikator menunjukkan nilai *composite reliability* di atas 0.7 dan nilai *cronbach's alpha* yaitu diatas 0.6. hasil ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model).

a. Tabel R-Square

Tabel 6
Output R-Square

	R-square	R-square adjusted
Perilaku <i>Fraud</i>	0.35	0.331

Sumber: Output SmartPLS V4

Pengujian R-square dimaksudkan untuk melihat prosentase pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, dimana semakin besar nilai R-square maka semakin baik hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Pada tabel 6 diketahui bahwa variabel independent yaitu arogansi, kesempatan, kompetensi, rasionalisasi dan tekanan mempengaruhi 35% variabel independent yaitu perilaku fraud, hal ini menunjukkan masih sangat mungkin terdapat variabel lain yang mempengaruhi perilaku fraud.

b. Uji Hipotesis

Tabel 7
Output Path coefficients

	Path coefficients
Arogansi -> Perilaku Fraud	0.211
Kesempatan -> Perilaku Fraud	0.355
Kompetensi -> Perilaku Fraud	0.068
Rasionalisasi -> Perilaku Fraud	0.115
Tekanan -> Perilaku Fraud	0.232

Sumber: Output SmartPLS V4

PEMBAHASAN

Pengaruh tekanan terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Dari tabel 7 dapat dilihat nilai *Path coefficients* variabel tekanan terhadap perilaku kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah adalah 0.232 dimana hasil ini >0.05 yang berarti tekanan tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perilaku fraud dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Yang menunjukkan **H1 ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayati & Mulyadi (2017) yang menyatakan bahwa tekanan yang digambarkan dengan tekanan finansial tidak mampu membuat seorang individu melakukan kecurangan. Akan tetapi hasil penelitian ini berseberangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwati, (2019), Mulyandini et al. (2023), Fahjar (2019), serta Suryandari et al. (2019) yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, yang mana semakin besar tekanan secara finansial maka semakin besar pula kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan (Dewi & Dewi, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petugas pengadaan tidak menganggap tekanan baik tekanan internal maupun tekanan eksternal tidak ada kaitannya dengan perbuatan curang yang dilakukan individu pada proses pengadaan barang jasa pemerintah.

Pengaruh kesempatan terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh variabel kesempatan terhadap *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar $0.355 > 0.05$, sehingga **H2 ditolak**. Hasil penelitian ini berkebalikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani et al., 2021), (Larasati et al., 2017), (Artantri et al., 2016) serta (Agustina & Pratomo, 2019) yang menunjukkan bahwa kesempatan atau *opportunity* berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kecurangan, yang mana semakin kecil kesempatan yang diprosikan dengan menguatnya pengawasan internal organisasi maka semakin kecil kecenderungan individu melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Solikhah, 2019) yang menyatakan bahwa sebuah kesempatan tidak berpengaruh terhadap timbulnya perilaku kecurangan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesempatan yang muncul yang diprosikan oleh evaluasi, tindak lanjut, pemantauan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah tidak dianggap akan menimbulkan atau menekan tindakan kecurangan.

Pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Nilai *path coefficient* variabel kompetensi sebesar $0.068 > 0.05$ yang menunjukkan bahwa **H3 ditolak** yang mana berarti kompetensi individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Hanafi, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan individu sebagai indikator variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*, sebaliknya pempupukan moral individu menunjukkan mampu menekan kecenderungan *fraud*. Penelitian ini menolak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) dan (Mulyandini et al., 2023) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan perangkat desa yang bertugas dalam proses pengadaan barang menganggap kompetensi dan kapabilitas individu tidak memicu timbulnya *fraud*.

Pengaruh rasionalisasi terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, hal ini menunjukkan **H4 ditolak** karena memiliki nilai *path coefficient* variabel kompetensi sebesar $0.115 > 0.05$. penelitian ini mendukung (Mulyandini et al., 2023) yang menyatakan bahwa rasionalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan (Hidayati & Mulyadi, 2017) mengatakan bahwa etika dan moral sebagai proksi rasionalisasi berpengaruh untuk menekan timbulnya kecurangan. Penelitian ini menunjukkan perangkat desa yang bertugas dalam proses pengadaan barang menganggap bahwa tidak ada keterkaitan *fraud* dan rasionalisasi individu. Tidak ada alasan yang membenarkan perilaku kecurangan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

Pengaruh arogansi terhadap kecenderungan *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai *path coefficient* variabel arogansi 0.211 yakni lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa **H5 ditolak** hasil penelitian ini mendukung penelitian (Mulyandini et al., 2023) yang menyatakan bahwa arogansi tidak mempengaruhi kecenderungan *fraud* pengadaan barang jasa pemerintah. Arogansi yang diprosikan oleh hubungan pimpinan dan bawahan, struktur organisasi, etika pimpinan dan posisi kekuasaan tidak terkait dengan timbulnya kecurangan. Berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina & Pratomo, 2019) dan (N. P. E. Suryandari et al., 2019) menyatakan bahwa arogansi berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku kecurangan. Arogansi pimpinan organisasi yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh sistem dapat menimbulkan intervensi pada bawahan untuk melakukan kecurangan (Danuta, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian adalah (i) Tekanan (*pressure*) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan timbulnya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; (ii) Kesombongan (*arrogance*), tidak berpengaruh terhadap kecenderungan timbulnya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; (iii) Kemampuan (*competence*), tidak berpengaruh terhadap kecenderungan timbulnya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; (iv) Peluang (*opportunity*), tidak berpengaruh terhadap kecenderungan timbulnya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; (v) Rasionalisasi (*rasionalization*) tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan timbulnya *fraud*

pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian, keterbatasan pada penelitian ini adalah kuisioner yang digunakan oleh peneliti menggunakan kombinasi dari berbagai sumber tanpa dilakukan uji coba sebelumnya, sehingga memungkinkan bahwa poin pertanyaan dalam kuisioner yang dibagikan kurang dapat dipahami oleh responden, oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan menjabarkan pertanyaan kuisioner dengan lebih jelas serta dapat memastikan bahwa setiap responden memahami setiap pertanyaan dan memastikan bahwa kuisioner diisi oleh responden itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, U. (2019). *Dampak Jabatan Dalam Memoderasi Pengaruh Tekanan, Peluang dan Rasionalisasi Terhadap Niat Melakukan Fraud*. Unisversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44–62. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp44-62>
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.
- Bojonegoro Radar. (n.d.). *Desak Usut Satu Desa Terima 99 Rumah Tidak Layak Huni di Lamongan _ Radar Bojonegoro*.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Darwati. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang. In *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Detikjatim. (2023a). *4 Tersangka Korupsi Hibah PJU Rp 64 M di Lamongan Dibui*.
- Detikjatim. (2023b). *Kades Lamongan Terseret Kasus Korupsi Pengukuran Tanah Rp 579 Juta*.
- Dewi, I. A. P. K., & Dewi, G. A. K. R. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12, 534–546. <https://repo.undiksha.ac.id/5133/>
- Fahjar. (2019). *DETERMINAN FRAUD DANA DESA: ANALISIS FRAUD PENTAGON* (Issue 113) [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31330>
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 274–293. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201>
- Larasati, Y. S., Larasati, Y. S., Sadeli, D., Akuntansi, M., & Pancasila, U. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 43–60.
- Mulyandini, V. C., Nugraha, A. A., & Kusumastuti, E. D. (2023). Analisis Peran Fraud Pentagon Theory dalam Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*, 8(01), 1–12.
- Rahman, A. A., & Nurbatiti, A. (2019). No Title Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Fraud Pentagon. *Journal Accounting and Finance*, 3(2), 34–44.
- Ratnasari, E., & Solikhah, B. (2019). Analysis of Fraudulent Financial Statement: The Fraud Pentagon Theory Approach Analisis Kecurangan Laporan Keuangan: Pendekatan Fraud Pentagon Theory. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 98–112.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(03), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Suryandari, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 1–10.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI*

-
- DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Yusrianti, H., Ghozali, I., & N. Yuyetta, E. (2020). Asset Misappropriation Tendency: Rationalization, Financial Pressure, and the Role of Opportunity (Study in Indonesian Government Sector). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 373–382. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8148>